

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.
- Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta, Sinar Grafika,.
- Hendri Raharjo, 2009, *Hukum Perizinan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Jonathan Sarwono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Marlia Sastro, 2016, *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL)*, Lhoeksumawe, Banda Cetak.
- Moeleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung
- Mursid Raharjo, 2014, *Memahami Amdal*, Semarang, UNDIP Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Philippus M Hadjon, 2013, *Pengantar Hukum Perizinan*.
- Sirajuddin, dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Setara Press. Malang.
- S. F, Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan 1. FH UH Press.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sopi, 2013, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai*, Bandung, Madya
- Soeparto, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Yogyakarta



Sujanto, 2005 *Beberapa Pengertian Dibiidang Pengawasan Edisi Revisi,Cetakan Keempat, Cet* Jakarta: Ghalia Indonesia.

## JURNAL

Arini Nur Annisa, dkk, "Government Supervision Of The Rights Fulfillment Of Housed Workers In The Transition Period", *Awang Long Law Review*, Vol. 5, No.1 November 2022, 260-268.

Aji Pratama, 2020, Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(01).

Al Amri, F. H. (2022). Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(3)

Andini, D., & Mina, R. (2020). Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2),

Anggriyani, R., Lanontji, M., Rusdi, N., & Daoed, D. T. S. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Melalui Pembuangan Air Limbah Domestik di Teluk Kendari. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 2(1),

Delta, R., Nadriana, L., Handayani, H., Faryando, A. A., & Gunawan, R. (2023). Implementasi Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(02),

Dewi, D. K. (2018). Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uuplh). *JURNAL MUTIARA HUKUM*, 1(1).

Dirga, I. W. B. J. S., & Lestari, A. A. A. (2023). Efektifitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Limbah Domestik Di Kabupaten Badung. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1);



E. (2016). Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Lingkungan lup Yang Dilakukan Oleh Korporasi. Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan lup.

- Fauzia, D. A., & Siska, F. (2021). Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Cirebon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*,
- Fauziyah, 2023, Pengelolaan Limbah Domestik Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Lumajang Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4).
- Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1).
- Kurniawan, B. (2019). Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan tantangannya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), hlm. 147.
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2)
- Nazar, F., Mochtar, S., Sufianti, E., Wirjatmitrilestari, E., & Jubaedah, E. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Domestik Ke Badan Air Penerima Di Kabupaten Purwakarta. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1)
- Novindri, M. R., Hidayani, S., & Lubis, E. Z. (2020). Penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Cair di Usaha Dagang Tahu Jawa (Studi Kasus di Pabrik Tahu Usaha Dagang Jawa). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1)
- Palilingan, T. N. (2016). Pembentukan peraturan daerah dalam rangka pengelolaan limbah domestik. *Lex et Societatis*, 4(9)
- Panambunan, A. M. (2016). Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Lex Administratum*, 4(2)



i, S. B., & Handayani, I. G. A. K. R. (2020). Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 1(2)

Retno Indah Kwardani, 2021, *Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin

Sangki, C. A. A. T. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang. *Lex Privatum*, 13(2), hlm. 90.

Silvia, M. (2022). *Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Pabrik Tahu An Pengombin Kramatagung Menurut Perda No 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo* (Skripsi, UIN KH Achmad Shiddiq Jember), hlm. 87.

Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), hlm. 184.

Srilaksmi, N. K. T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2), hlm. 1.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan, *Justicia*, Vol. 1 No. 1, hlm. 11.

Tendean, C., Tilaar, S., & Karongkong, H. H. (2014). Pengelolaan air limbah domestik di permukiman kumuh di kelurahan calaca dan istiqlal kecamatan wenang. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur*, 6(3)

Uyun, F. N., Siska, F., & Chotidjah, N. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.

Vianka, M. I. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2)

Zulkifli, A. (2019). Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan. *Wasaka Hukum*, 7(1),

## SKRIPSI

Azizah, D. F. (2022). *Kepatuhan hukum masyarakat desa Sidomukti terhadap perda Kabupaten Gresik nomor 8 tahun 2015 tentang pengelolaan air limbah domestik dalam perspektif Fiqh Bi'ah: Studi di desa Sidomukti Kecamatan Bungah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).



Mega Silvia, 2022, *Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Pabrik Tahu An Pengombin Kramatagung Menurut Perda No 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN KH Achmad Shiddiq Jember

Mukarromi, A., & Ishak, I. (2017). *Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)* (Doctoral dissertation, Riau University).

Retno Indah Kwardani, 2021, *Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkunga Hidup Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sengkey, K. S. S. (2018). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha Laundry Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, UAJY).

Silvia, M. (2022). *Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Pabrik Tahu An Pengombin Kramatagung Menurut Perda No 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Shiddiq Jember).

Soewarno dalam Sapurta. 2017, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Produksi Bata Merah Di Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka*, Skripsi, Fakultas Hukum Unpas.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cinta Kerja Menjadi Undang-Undang



in Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang  
Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 oleh Dinas  
Lingkungan Hidup Kota Makassar

## **WEBSITE**

Daniel, 2011 “sejumlah pabrik diduga lakukan pencemaran sungai tallo”,  
Antaraneews.com Makassar, Edisi tanggal 09 februari 2011.

Eka Hakim, 2023 “Aroma Korupsi Penggunaan Anggaran Pengelolaan  
Limbah Kawasan Industri Makassar”, Liputan 6.com Makassar,  
Edisi tanggal 20 Mei 2023.

Kristianus Nardi Jaya, 2023 “Komisi C DPRD Tanggapi Video Viral Terkait  
Sungai Tallo Diduga Tercemar Limbah PT Kima dan Makassar  
Tene”, Suaraburuh.com, Edisi Tanggal 10 Mei 2023.

Redaksi, 2022 “Dampak Pencemaran Sungai Tallo, Komisi C Adili PT.  
KIMA dan Makassar Tene” Wajahindonesia.co.id Makassar,  
Edisi Tanggal 09 September 2022.

Sri Wahyu Diastuti, 2023 “Sungai Tallo Tercemar Parah Membuat Warga  
Alergi Gatal, Pemkot Pastikan Pelaku Disanksi”, Sulselsatu.com  
Makassar, Edisi Tanggal 16 Mei 2023.



## LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: [dpmpstp.makassarkota.go.id](http://dpmpstp.makassarkota.go.id)



### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/1206/SKP/SB/DPMPSTP/1/2024

#### DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/1206/SKP/SB/DPMPSTP/1/2024, Tanggal 26 Januari 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 1204/SKP/SB/BKBP/1/2024

#### Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	:	ST NURUL UTAMI S
NIM / Jurusan	:	B021191026 / Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1) / Universitas Hasanuddin
Alamat	:	Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Lokasi Penelitian	:	Terlampir,-
Waktu Penelitian	:	29 Januari 2024 - 29 Februari 2024
Tujuan	:	Skripsi
Judul Penelitian	:	"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 32 TAHUN 2018 TERHADAP PENGAWASAN IZIN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR)"

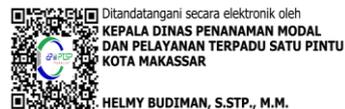
Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-01-31 14:31:26



Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **1825/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 394/UN4.5.1/PT.00/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ST NURUL UTAMI S**  
Nomor Pokok : **B031191026**  
Program Studi : **Hukum Administrasi Negara**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 32 TAHUN 2018 TERHADAP PENGAWASAN IZIN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **29 Januari s/d 29 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

